

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Widjaja, 2012:1).

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat dan bijak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perkembangan otonomi daerah pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat,

mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Dengan adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dari dan oleh untuk rakyat. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrembangdes hasil musyawarah tersebut di tetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa (Gema Bersemi, 2010).

Dalam mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa COMBINE Resource Institution sebuah organisasi masyarakat sipil membuat Sistem Informasi Desa sebagai alternatif atas profil desa. Hal ini dikarenakan dari sisi teknis profil desa kurang memadai dan bahkan kurang untuk menginput data yang diminta. Ditinjau dari pemutakhirannya profil desa bersifat statik. Data diperbarui dalam selang minimal satu tahun sekali sehingga tidak mampu menjawab perkembangan dinamik masalah-masalah aktual desa. Keterbatasan pada sistem tersebut kian parah dengan kenyataan bahwa sistem basis data

profil desa masih digunakan untuk melayani pemerintah yang lebih tinggi. Ini menjadi bagian yang dikeluhkan oleh perangkat pemerintah desa (Jahja,dkk.,2012:5-7).

Desa mempunyai otonomi dalam membangun dan menjalankan Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa adalah salah satu emansipasi local yang tidak hanya bermanfaat bagi desa tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Salah satu desa yang sudah menjalankan Sistem Informasi Desa ini adalah Desa Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Desa terpencil dengan kesejahteraan masyarakat yang rendah ini kini menjadi desa digital yang di dunia maya. Seperti dikutip dari *website* resmi Desa Dlingo ([dlingo-bantul.desa.id](http://dlingo-bantul.desa.id)), bahkan kini Desa Dlingo meraih penghargaan dibidang Sistem Informasi yakni sebagai Desa Pelaksana Sistem Informasi Desa terbaik Se-Kabupaten Bantul dari Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul.

Melalui Sistem Informasi Desa kini Desa Dlingo mampu menampung dan mengolah data bahkan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari data kependudukan hingga dari potensi-potensi unggulan desa. Sistem Informasi Desa sangat membantu mengolah data-data sehingga menjadi poin tersendiri sebagai masukan dalam perencanaan desa maupun pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintah desa.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA” (Studi Kasus di Desa Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Sistem Informasi dalam Pembangunan Desa di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi desa dalam Pembangunan Desa di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan perkembangan ilmu pemerintahan terkait Sistem Informasi Desa.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi *stakeholders*, terutama pemerintah desa untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi desa yang baik dan benar.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **1. *E-government***

*E-government* merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi dan komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi E-Government dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan sebagai bentuk

wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan public (Karniawati dan Rahmadani 2011:233).

Banyak negara besar yang telah mengimplementasikan konsep *E-government* diantaranya yaitu Amerika dan Inggris melalui Al-Gore dan Tony Blair (dalam Indrajit 2002:4) telah secara jelas dan merinci manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas peayanan kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisisensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

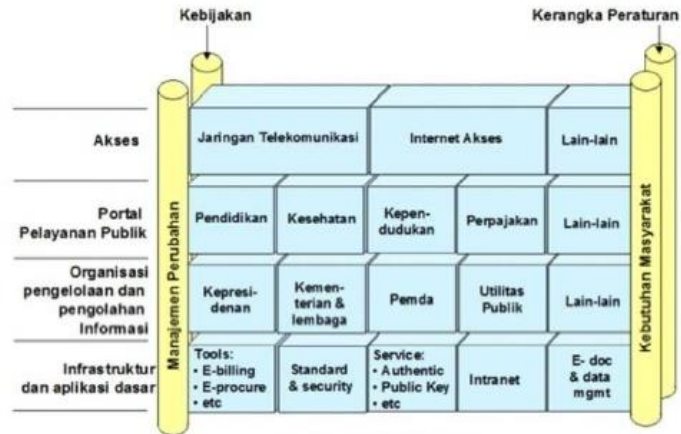
- e. Menciptadiakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis.

Sedangkan menurut Djunaedi (2002:2) mengambil dari situs web bank dunia E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi seperti wide area newtwork, internet dan komunikasi bergerak oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberi layanan pemerintahan yang lebih baik keppada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha atau manajemen pemerintahan yang ebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan atau pengurangan biaya.

Sedangkan menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan infomrasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *E-Government* berorientasi pada kerangka dibawah ini:

Gambar 1

Kerangka Arsitektur *E-Government*



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kerangka arsitektur *E-Government* terdiri dari empat lapis struktur seperti berikut ini:

a. Akses

Akses merupakan ujung dari saluran komunikasi, jaringan internet atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai portal layanan publik.

Cara akses di setiap daerah selalu berbeda karena tergantung pada kondisi infrastruktur jaringan komunikasi dan kesiapan pemerintah serta masyarakat pengguna.



Senada dengan siapnya pemerintah diharapkan setiap lembaga pemerintah menyediakan layanan public yang dapat mudah diakses melalui situs web. Akses ini berhubungan dengan jaringan telekomunikasi, jaringan internet, media komunikasi lainnya yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses situs pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah.

b. Portal Pelayanan Publik

Portal pelayanan public adalah situs web penyedia layanan public yang diberikan oleh suatu pemerintahan. Pemerintahan yang melaksanakan pelayanan public harus bertanggungjawab terhadap informasi yang diberikan. Layanan portal yang diberikan harus dapat diakses 24 jam, 7 hari, dalam 1 minggu tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Portal layanan public yang dimaksud adalah situs web pemerintah yang berbasis internet yang memberikan informasi dan dokumen elektronik dari instansi terkait.

c. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi adalah yang menyediakan, mengelola, dan mengolah informasi dan dokumen elektronik bisa disebut juga dengan *back office*.

#### d. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai upaya terealisasinya suatu kebijakan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar terealisasi di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana

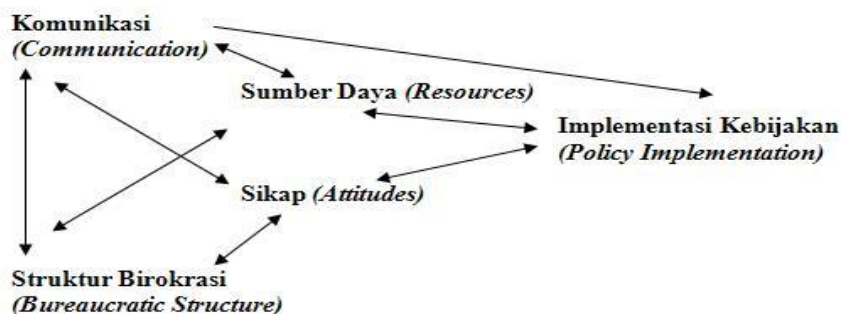
dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2006) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Menurut Dunn (1999:80) implementasi kebijakan pada dasarnya suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

Edward mengemukakan bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik. Interaksi antara faktor-faktor dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2

Hubungan Faktor-faktor Implementasi Publik



Sumber: GEORGE C. EDWARD III, 1980: 9)

Adapun secara terperinci dalam Edward III (1980) penjelasan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Maka dari itu komunikasi merupakan bagian penting agar implementasi dapat efektif. Dimana dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan pelaksana kebijakan harus memahami apa yang harus mereka lakukan.

Dalam komunikasi menurut Edward III, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni:

1. Transmisi

Transmisi atau penyaluran komunikasi yakni para pelaksanan kebijakan harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Karena seringkali suatu kebijakan dibuat namun proses pelaksanaannya tidak berjalan sesuai yang diinginkan.

2. Kejelasan (*clarity*)

Petunjuk pelaksanaan harus jelas agar dapat dipahami untuk diimplementasikan. Maka dari itu akan sulit untuk mengimplementasikan suatu kebijakan jika adanya ketidakjelasan petunjuk.

### 3. Konsistensi (*consistency*)

Konsisten yang dimaksud adalah taatnya sikap aparaturnya pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

#### b. Sumber Daya

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif maka dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementator kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Berikut adalah beberapa sumber daya yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan:

##### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai implementator kebijakan harus memiliki jumlah yang pas dan mempunyai kualitas yang mumpuni. Jumlah yang pas ialah jumlah yang sesuai yang dibutuhkan.

## 2. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan adalah alat-alat yang digunakan guna menunjang pelaksanaan implementasi.

## 3. Sumber Daya Wewenang

Sumber Daya Wewenang adalah wewenang yang dimiliki implementator kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan yang dimilikipun berkaitan dengan hal-hal yang diamanatkan.

### c. Disposisi (sikap kecenderungan)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin mudah.

### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan dapat dua hal penting dalam birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard dan fragmentasi (Mutiarin dkk, 2014:25-34).

### **3.Sistem Informasi Desa**

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut CRI (Combine Resource Institution), Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat desa. Kaitan dalam hal ini kemungkinan besar Pengejawantahan SID oleh negara kala itu adalah mengadopsi model yang dikembangkan oleh CRI.

#### **a. Tujuan Sistem Informasi Desa**

Sistem informasi desa yang dibangun semuanya mengarah pada satu tujuan utama yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan ini mencakup:

1. Pengembangan standarisasi pelayanan
2. Peningkatan efisiensi pelayanan
3. Pelayanan yang lebih terjangkau oleh semua pihak
4. Pembaharuan data sesuai kebutuhan masyarakat

Salah satu tujuan utama dari sistem informasi desa yang menjadi harapan pemerintah desa selama ini yaitu memperbaiki kualitas pelayanan publik yang bisa diukur dengan adanya kepastin dan kecepatan layanan. Selain itu tujuan sistem informasi desa untuk penguatan data profil desa yang akan memudahkan desa dalam perencanaan dan penganggaran dalam bentuk:

- a. Metode perencanaan partipiatif
- b. Analisis masalah dan potensi desa
- c. Metode pemilihan skala prioritas kegiatan
- d. Penyusunan anggaran dan belanja desa
- e. Berkomunikasi melalui data yang akurat

b. Stategi dan pelaksanaan prinsip Sistem Informasi Desa

Dalam perkembangannya pemanfaatan SID pada fase yang paling awal adalah menyediakan informasi bagi pemerintah desa dan masyarakatnya. Bagi perangkat desa konten SID bisa digunakan untuk menyusun atau mengkaji dokumen-dokumen perencana dan penganggaran pembangunan desa (RPJMDes, APBDes) dengan menggunakan data kependudukan, pendapatan dan sumber daya lainnya. Sedangkan bagi masyarakat SID mampu menjadi basis data atau sumber pengetahuan terhadap pembangunan di desanya.



Bagi pemerintah desa dengan adanya SID mampu mendukung proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Bagi masyarakat mereka akan memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, akurat, dan terjangkau. Pada fase ini SID mampu melakukan transformasi bagi desa-desa yang menggunakannya.

SID juga mendukung komunikasi dan informasi dua arah. Pemerintahan desa akan memperoleh respon, umpan balik, serta masukan dari masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat melalui SID ini akan mendapat ruang untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan dan evaluasi pembangunan.

#### **4. Pembangunan Desa**

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa saling berkaitan erat dengan pemerintahan Negara. Bahkan mayoritas masyarakat Indonesia masih bertempat tinggal di desa. Hal inilah yang membuat desa harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah guna mencapai pembangunan nasional yang dimulai dengan adanya pembangunan desa.

Menurut Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja akan tetapi melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurut CST Kansil dalam (Hasanah, 2015), pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Adanya pembangunan desa diharapkan dapat member peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung baik itu dari adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek tujuan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan juga sumberdaya alam.

## **F. Definisi Konseptual**

### *1. E-government*

E-government adalah pengembangan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi elektronik. Dimana *e-government* sangat mempermudah kinerja pemerintah dalam memberikan layanan publik atau informasi baik ke masyarakat, ke pebisnis, maupun ke sesama pemerintahan.

### *2. Implementasi Kebijakan*

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari tahapan pembuatan kebijakan. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan dan diharapkan mendapat outcome seperti yang diinginkan. Dalam sistem informasi desa implementasi kebijakan yang dibuat dapat berjalan dan berhasil sesuai output dan outcome yang direncanakan.

### *3. Sistem Informasi Desa*

Sistem informasi desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi yang mempermudah pemerintahan desa dalam menghimpun, mengolah, mengelola dan menggunakan informasi-informasi yang ada di desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

#### 4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan program atau kebijakan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

### **G. Definisi Operasional**

#### *1. E-Government*

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *E-Government* berorientasi pada faktor berikut ini:

- a. Akses
- b. Portal Layanan Publik
- c. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar

#### 2. Implementasi Kebijakan Publik

Tingkat keberhasilan suatu program dapat dilihat dari bagaimana implementasinya. Untuk memudahkan peneliti menggunakan teori George C. Edward yang berpendapat bahwa ada 4 (empat) variabel dengan indikator-

indikator yang dipergunakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan diteliti, yaitu:

### 1. Implementasi Kebijakan

#### a. Komunikasi

1. *Transmission* (transmisi)
2. *Clarity* (kejelasan)
3. *Consistency* (konsistensi)

#### b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Peralatan
3. Sumberdaya Kewenangan

#### c. Disposisi (Sikap Kecenderungan)

1. Respon implementator terhadap kebijakan
2. Pemahaman implementator terhadap kebijakan yang dilaksanakan

#### d. Struktur Birokrasi

1. Bentuk organisasi pelaksana
2. SOP

### 3. Pembangunan Desa

Keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan dalam pembangunan desa dapat dilihat dari prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam

- b. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keberadaan komunitas tertentu yang berdiam di tempat tertentu, atau mengenai gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam hal ini peneliti berusaha menemukan fakta dan memahami permasalahan yang dihadapi pada proses implementasi sistem informasi desa dalam pembangunan desa. Masalah yang dikemukakan adalah faktor-faktor yang membuat keberhasilan Sistem Informasi Desa.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dengan pertimbangan waktu yang tersedia, jarak yang ditempuh

tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bantul. Dengan pertimbangan seperti diatas pula maka peneliti mengambil sampel pada Desa Dlingo. Selain itu Desa Dlingo merupakan salah satu desa yang melaksanakan program SID dan mendapat predikat SID terbaik se-Bantul sehingga diharapkan tidak sulit dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer telah diperoleh langsung dari informan berupa data hasil wawancara dan obersvasi di lapangan terhadap pemerintahan dan masyarakat Desa Dlingo. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Lurah Desa Dlingo, Kepala Urusan Program Desa Dlingo, dan masyarakat Desa Dlingo sebagai pengguna sistem informasi desa.

TABEL 1

Data Primer Penelitian

No	Nama Data Primer
1	Lurah Desa Dlingo
2	Operator Sistem Informasi Desa Dlingo
3	Masyarakat Desa Dlingo

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, sumber dari media masa dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh terkait dengan tujuan, tata cara pelaksanaan, dan progress dari program SID di Desa Dlingo.

TABEL 2

No	Nama Data Sekunder
1	Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa
2	Profil Desa Dlingo
3	Website Desa Dlingo

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan bertatap muka dan berinteraksi tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu:

- a. Lurah Desa Dlingo
- b. Kepala Urusan Program Pemerintahan Desa Dlingo
- c. Masyarakat Desa Dlingo



#### b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi atau situasi berdasarkan fakta sehingga dapat mendukung dan bermanfaat untuk melengkapi data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini penulis melihat langsung kondisi dilapangan bagaimana impementasi Sistem Informasi Desa di Desa Dlingo dan sarana prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan program tersebut.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data berupa tulisan-tulisan, peraturan, dokumen, foto dan lain lain yang berkaitan dengan topic penelitian.

### **5. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada saat peneliti di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan kemudian dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Peneliti menggunakan analisis kualitatif interaktif. Dalam model ini ada 4 komponen analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), yaitu:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dirasa tepat dan untuk menentukan focus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi data

Sebagai proses seleksi, pemfokusan, transformasi data kasar yang ada dilapangan dan diteruskan pada waktu pengumpulan data.

c. Penyajian Data

Merupakan format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan, kata-kata, gambar maupun table. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Dari hasil analisis data peneliti akan menarik kesimpulan.